

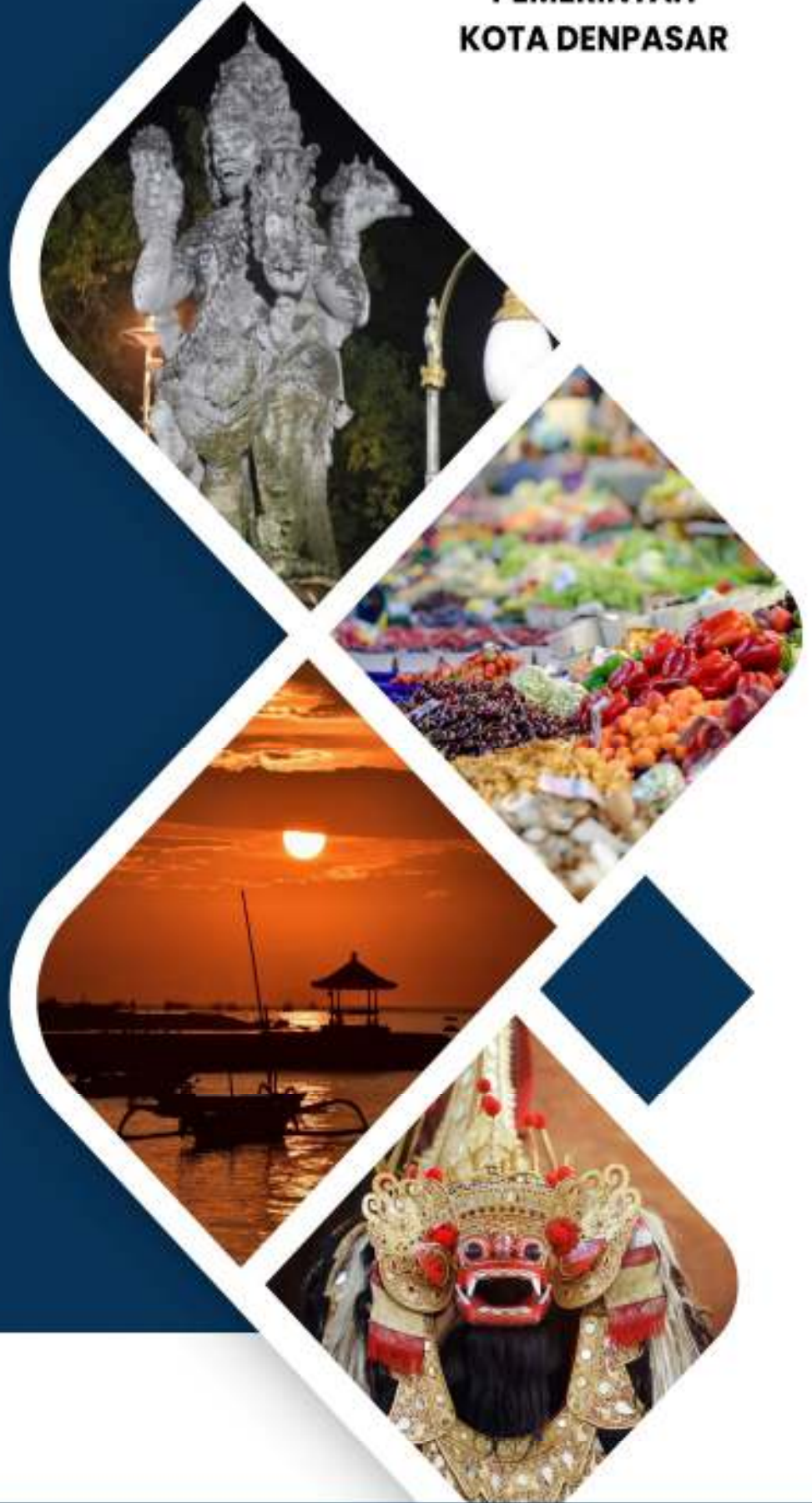


**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR

2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta Berencana 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD memuat gambaran umum kondisi Daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar, RKP dan RKPD Provinsi Bali.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Substansi RKPD memuat perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang dalam sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII: Penutup
- (2) Penjabaran substansi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

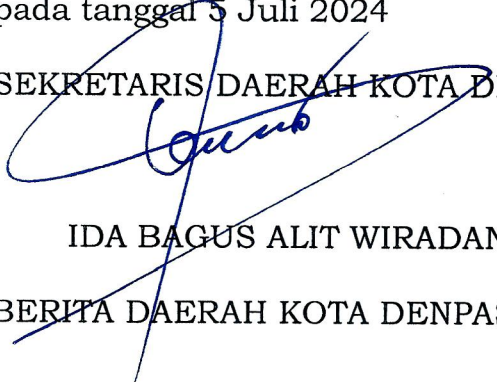
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 23

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025.

Kami berharap Dokumen renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 08 Juli 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar


I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (jika ada) 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda 34

3.3 Program dan Kegiatan..... 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 40

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 40

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kota..... 40

BAB V PENUTUP..... 44

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 44

5.2 Rencana Tindak Lanjut 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Denpasar
Tahun 2023 11

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2023 Kota Denpasar 18

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar 24

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Denpasar 26

Tabel 2. 5 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kota Denpasar..... 31

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 35

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalianm, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Penyusunan Persiapan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir, dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3465);
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menuengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- u. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53).
- v. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode satu tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkup Bappeda Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026.

Didalam Rencana Kerja (RENJA) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Bappeda dalam melaksanakan program/kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2025;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, serta Tantangan dan peluang.

BAB III TUJUAN, SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah , dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kota Denpasar tahun 2023 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Kinerja Bappeda merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka program-program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam rangka mencapai outcome yang telah ditetapkan. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM) barang/modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tahun 2023 adalah:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	34 Orang	34 Orang
Kegiatan :			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1 Paket
Kegiatan :			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100,00%	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
Sub Kegiatan :			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan
Kegiatan :			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	35 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100,00%	100,00%
Kegiatan :			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan:			
Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Penetapan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen
Kegiatan :			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan:			
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
Kegiatan:			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan:			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	5 Laporan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokuen Perencnaaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Kegiatan :			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100,00%	100,00%
Sub Kegiatan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan
Kegiatan :			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD danRKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 laporan	6 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	18 Laporan
JUMLAH		100,00%	

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.689.506.455 ,- (Tiga Belas Milyard Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Secara umum Realiasasi kegiatan Bappeda tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Target :

1. BELANJA	: 13.689.506.455
Belanja Operasi	: 12.939.385.063
a. Belanja Pegawai	: 6.464.919.969,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: 6.474.465.094,00
Belanja Modal	: 750.121.392,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: 750.121.392,00
- Jumlah Paket Belanja Barang Jasa	: 159
- Jumlah Paket Belanja Modal	: 8

Realisasi :

1. BELANJA	: 10.371.049.441,00
Belanja Operasi	: 9.667.323.441,00
a. Belanja Pegawai	: 5.963.971.098
b. Belanja Barang dan Jasa	: 5.889.653.363

Belanja Modal	:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	731.626.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:	0
- Jumlah Paket Belanja Barang Jasa	:	144
- Jumlah Paket Belanja Modal	:	8

Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023.Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ada pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Secara keseluruhan realisasi program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 telah tercapai 100% sehingga dari 3 program dan 10 kegiatan, tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari 3 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target/kinerja yang ditetapkan Tahun 2023, antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimana didalamnya terdapat 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.472.087.807
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan didalamnya terdapat 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan Adapun presentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.761.220.515
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan kedalam 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dimana persentase capaian kinerja telah

sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.351.941.139

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja beberapa kegiatan yang realisasi belum tercapai adalah sebagai berikut :

- a) Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan.
- b) Kemampuan dalam perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal
- c) Teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal.
- d) dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel belum optimal.
- e) Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
- f) Bappeda tupoksinya mengkoordinasikan program kegiatan Perangkat Daerah, dilain pihak petugas perencana di Perangkat Daerah belum maksimal sehingga berdampak pada kinerja Bappeda sendiri.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.
- b) Terhadap program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja

yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti diatas adalah:

- a) Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
- b) Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.

Adapun perkiraan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Denpasar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%		
5	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah							
5	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	34 orang	34 orang	100%	34 Orang/Bulan	
5	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%		
5	1	1	2	6	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	
5	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%		
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	
5	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah								
5	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit Mobil & 28 Unit Sepeda Motor	35 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	35 Unit		
5	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit AC, 2 unit alat studio, 30 unit komputer, 10 unit laptop, 15 unit printer, 1 unit jaringan internet	79 Unit	79 Unit	79 Unit	100%	79 Unit		
5	1	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat								
							2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD								
5	1	2	2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar								

KODE							URUSAN/BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	1	2	2	1	1		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5	1	2	2	1	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%			
5	1	2	2	1	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
5	1	2	2	2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	11 Masukan	100%	100%	100%	100%			
5	1	2	2	2	1		Penyusunan profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%			
5	1	2	2	3			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5	1	2	2	3	3		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%			

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokuen Perencnaaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar								
5	1	3	2	1		Koordinasi Perencanaa Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar								
5	1	3	2	1	4	Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-	-		
5	1	3	2	1	8	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan RKPD / RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	1	3	2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	1	3	2	2	4	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan		
5	1	3	2	2	8	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		
5	1	3	2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
5	1	3	2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
5	1	3	2	3	4	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan		
5	1	3	2	3	8	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewlyahan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporn	100%	18 Laporan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- b. Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- c. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang

berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda Kota Denpasar yaitu tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas, Bersinergi, dan Kridibel”, dengan sasaran “Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar”. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Denpasar telah disajikan melalui tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Presentase Konsistensi Perencanaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan , partisipatif dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif , Tematik , Spasial belum optimal.
2. Sinergitas perencanaan pembangunan belum optimal
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Denpasar dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
- c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
- e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
- f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Denpasar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9,736,477,379.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.434.982.240,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Denpasar	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	100%	7,324,486,483.00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	100%	8.251.245.784,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	7,324,486,483.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	8.251.245.784,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Denpasar	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor</i>	100%	296,666,500.00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor</i>	100%	234.688.750,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	296,666,500.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	234.688.750,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Denpasar	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	1,064,826,224.00	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	892.749.746,00
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	227,400,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	235.900.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	837,426,224.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	656.849.746,00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Denpasar	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	100%	1,050,498,172.00	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	100%	1.056.297.960,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	4	5	6
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	534,204,904.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	531.950.840,00
6	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	154,072,968.00	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	156.937.140,00
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	362,220,300.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	367.409.980,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Denpasar	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	100%	1,943,129,496.00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	100%	2.485.009.280,00
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Denpasar	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	100%	1,795,793,496.00	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	100%	2.417.568.280,00
8	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Denpasar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	120,649,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	121.282.000,00
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	732,434,996.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	541.666.280,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	4	5	6
10	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	942,709,500.00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.754.620.000,00
	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Denpasar	<i>Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	5 Laporan	96,745,000.00	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	5 Laporan	16.697.000,00
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	96,745,000.00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	16.697.000,00
	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Denpasar	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	50,591,000.00	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	50.744.000,00
12	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	50,591,000.00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	50.744.000,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	4	5	6
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	842,954,616.00	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	613.971.560,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Denpasar	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100%	152,761,848.00	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100%	88.436.140,00
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	152,761,848.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	88.436.140,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Denpasar	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	100%	161,892,332.00	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	100%	89.972.210,00
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	82,861,364.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	58.604.640,00
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	79,030,968.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	31.367.570,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	4	5	6
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Denpasar	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	528,300,436.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	435.563.210,00
16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	336,968,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	330.525.000,00
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	94,676,968.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	43.250.570,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	96,655,468.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	61.787.640,00
Jumlah					12,522,561,491.00	Jumlah			13.533.963.080,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (jika ada)

Berdasarkan Usulan Pokok Pikiran yang berasal dari Musrenbang RKPD Kota Denpasar tahun 2025 di Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025, serta telaah Usulan Langsung Masyarakat dan Usulan Reses DPRD. Bappeda Kota Denpasar tidak memiliki Usulan Pokir.

Tabel 2. 5 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Denpasar

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tertuang Hal – hal sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN :

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

PRIORITAS NASIONAL :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas & berdaya saing
4. Revolusi mental & pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Sedangkan yang menjadi Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

**“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG
HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA
SAING DAERAH.”**

PRIORITAS :

1. Pertanian, kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**“MEMPERKUAT DAYA SAING DEGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI
DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU”**

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Ekonom Kreatif, Pariwisata dan kebudayaan
3. Sosial dan ketenagakerjaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2024, Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Kota, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi serta Kota Denpasar tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi , rencana

kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

TUJUAN :

“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas , Bersinergi dan Kredibel “

SASARAN :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran :

1. Presentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar / 100%
2. Presentase konsistensi perencanaan /100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Bappeda Kota Denpasar	100%	10.473.117.240,00	DAU dan PAD		100%	11.478.480.464,00
5	01	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	8.248.245.784,00	DAU dan PAD		100%	9.076.370.362,40
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	29 orang/ bulan	8.248.245.784,00	DAU dan PAD		29 orang/ bulan	9.076.370.362,40
5	01	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	251.208.750,00	PAD		100%	258.157.625,00
5	01	01	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	12 Paket	251.208.750,00	PAD		12 Paket	258.157.625,00
5	01	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	903.798.746,00	PAD		100%	982.024.720,60
5	01	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	3 Laporan	235.900.000,00	PAD		3 Laporan	259.490.000,00
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	1 Laporan	667.898.746,00	PAD		1 Laporan	722.534.720,60
5	01	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	1.069.863.960,00	PAD		100%	1.161.927.756,00

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappeda Kota Denpasar	30 Unit	523.116.840,00	PAD		30 Unit	585.145.924,00
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda Kota Denpasar	79 Unit	156.937.140,00	PAD		79 Unit	172.630.854,00
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kota Denpasar	1 Unit	389.809.980,00	PAD		1 Unit	404.150.978,00
5	01	02	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	Bappeda Kota Denpasar	100%	2.443.984.280,00	PAD		100%	2.733.510.208,00
5	01	02	2	01		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	2.376.543.280,00	PAD		100%	2.659.325.108,00
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	2 Berita Acara	116.712.000,00	PAD		2 Berita Acara	133.410.200,00
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	4 Dokumen	572.095.280,00	PAD		5 Dokumen	595.832.908,00
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappeda Kota Denpasar	2 Dokumen	1.687.736.000,00	PAD		2 Dokumen	1.930.082.000,00

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	16.697.000,00	PAD		100%	18.366.700,00
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	5 Laporan	16.697.000,00	PAD		1 Laporan	18.366.700,00
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda Kota Denpasar	100%	50.744.000,00	PAD		100%	55.818.400,00
5	01	02	2	02	01	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda Kota Denpasar	1 buku	50.744.000,00	PAD		1 buku	55.818.400,00
5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	613.971.560,00	PAD		100%	675.368.716,00

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	100%	88.436.140,00	PAD		100%	97.279.754,00
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	12 laporan	88.436.140,00	PAD		12 laporan	97.279.754,00
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	100%	89.972.210,00	PAD		100%	98.969.431,00
5	01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	16 Laporan	58.604.640,00	PAD		16 Laporan	64.465.104,00
5	01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	6 Laporan	31.367.570,00	PAD		6 Laporan	34.504.327,00
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	100%	435.563.210,00	PAD		100%	479.119.531,00
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	3 Dokumen	330.525.000,00	PAD		3 Dokumen	363.577.500,00

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	6 Laporan	43.250.570,00	PAD		6 Laporan	47.575.627,00
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	18 Laporan	61.787.640,00	PAD		18 Laporan	67.966.404,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan , yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 , serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program , kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kota

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 serta Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2025, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah , Bappeda Kota Denpasar

tidak secara langsung mendukung Prioritas Kota Denpasar namun dalam kaitannya dengan pencapaian Program Prioritas Kota Denpasar dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) dan RKPD (Provinsi) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana daerah , rencana kerja dan pendanaannya , baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2025 program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Denpasar terdiri dari 3 (Tiga) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 17 (Tujuh belas) Sub Kegiatan yaitu :

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.473.117.240,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	100%	8.248.245.784,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	8.248.245.784,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor</i>	100%	251.208.750,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	251.208.750,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	903.798.746,00
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	235.900.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	667.898.746,00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	100%	1.069.863.960,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	523.116.840,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	156.937.140,00
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	389.809.980,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	100%	2.443.984.280,00
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	100%	2.376.543.280,00
8	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	116.712.000,00
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	572.095.280,00
10	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.687.736.000,00
	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	5 Laporan	16.697.000,00
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	16.697.000,00
	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	50.744.000,00
12	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	50.744.000,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	613.971.560,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100%	88.436.140,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	88.436.140,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	100%	89.972.210,00
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	58.604.640,00
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	31.367.570,00
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan</i>	100%	435.563.210,00
16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	330525.000,00
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	43.250.570,00
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	61.787.640,00
Jumlah				13.531.073.080,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 , merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Denpasar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya ;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 08 Juli 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar


I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 16 Juli 2024
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2023 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPd Kota Denpasar Tahun 2025	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Denpasar, 11 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar


I Putu Wisnu Witaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

